

**Politik Reaksioner:
Reaksi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda Terhadap Gerakan Radikal di
Bandung pada Tahun 1920-1927**

Agung Ramaadhan^{a,1*}, Yulia Sofiani^{b,2}

^{a, b} Jurusan Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat

¹ agung.pls15@gmail.com ; ² yuliasofiani@unsil.ac.id

* Corresponding author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan politik reaksioner oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam mengatasi pergerakan radikal di Bandung tahun 1920-1927. Penelitian dilakukan dengan menggunakan prinsip metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka terhadap sumber primer dan sekunder dengan instrument berupa sistem kartu. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 1920 di Hindia Belanda umumnya dan Bandung khususnya terjadi gejolak gerakan radikal di Hindia Belanda yang harus segera diatasi karena dapat mengganggu stabilitas di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan politik reaksioner melalui yang dilaksanakan melalui pendekatan persuasif dan koersif. Kepala pribumi dan aparat pemerintahan kabupaten termasuk para pejabat dan aparat, tokoh lokal termasuk menak, dan kaum elit Eropa dilibatkan dalam pendekatan persuasif yang mengutamakan terciptanya konsensus dari masyarakat kepada pemerintah kolonial. Sedangkan pendekatan koersif yang sifatnya mengancam dilakukan oleh polisi Hindia Belanda dan ormas reaksioner yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial.

Kata Kunci: Politik reaksioner, pergerakan radikal, Bandung

Abstract

This study aims to describe the implementation of reactionary politics by the Dutch East Indies colonial government in overcoming the radical movement in Bandung in 1920-1927. The research was conducted using the principle of the historical method which consisted of heuristics, criticism (internal and external), interpretation, and historiography stages. Data were collected by using literature study method on primary and secondary sources with the instrument in the form of a card system. The results show that since 1920 in the Dutch East Indies in general and Bandung in particular, there have been radical movements in the Dutch East Indies that must be addressed immediately because they can disrupt stability in the Dutch East Indies. The colonial government implemented reactionary political policies through persuasive and coercive approaches. Indigenous heads and district government officials including officials and officials, local figures including menak, and European elites were involved in a persuasive approach that prioritized the creation of consensus from the community to the colonial government. Meanwhile, the threatening coercive approach was carried

out by the Dutch East Indies police and reactionary mass organizations appointed by the colonial government.

Keywords: *Reactionary politics, radical movement, Bandung*

PENDAHULUAN

Situasi dan kondisi politik Bandung pada tahun 1920 terbilang memanas karena kerap terjadi gerakan yang dilakukan oleh kaum pribumi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda meningkatkan pengawasan untuk mendeteksi gerakan kaum pribumi agar cepat diantisipasi dan diatasi. Peristiwa Cimareme (1919) adalah faktor pemicu bermunculannya gerakan yang bersifat radikal di Bandung. Pemerintah kolonial menangkap tokoh Sarekat Islam (SI) seperti Tjokroaminoto dan Sosrokardo yang dianggap terlibat dalam gerakan tersebut. Moh. Sanoesi juga ditangkap di Bandung karena dianggap menyindir pemerintah kolonial melalui cerpennya berjudul “Gendjong Garut” (*Kaoem Moeda No. 44*, 21 Februari 1922). Bandung menjadi sorotan utama pemerintah kolonial karena di kota tersebut banyak kaum intelektual dan aktivis yang terlibat dalam organisasi-organisasi besar seperti SI dan Indische Partij (IP). Geliat mereka dianggap membahayakan eksistensi pemerintah kolonial. Untuk mengatasi gerakan radikal, pemerintah kolonial menetapkan kebijakan reaksioner yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan, penindakan, penangkapan, dan penertiban secara totaliter.

Pelaksanaan politik reaksioner semakin tajam selama periode 1922-1927, terutama setelah terjadinya berbagai gerakan seperti pemogokan buruh pegadaian dan kereta api (1922), pemogokan pegawai polisi (1923), dan pemberontakan partai komunis (1926-1927). Tujuan politik reaksioner adalah untuk mereduksi intensitas gerakan radikal yang dilakukan oleh kaum pribumi. Pembentukan berbagai organisasi dan digelarnya aneka diskusi tentang ide-ide radikal tentang nasib bangsa dan kesetaraan kelas semakin kerap terjadi karena Bandung sebagai *Intelectuele Centrum van Indie* telah melahirkan golongan baru, yaitu golongan kaum intelektual (Ekadjati, 1998: 73-77). Merekalah yang mendorong perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, salah satunya adalah keterbukaan untuk bergabung dalam wacana diskursif-kolektif. Bandung telah menjadi rahim bagi berdirinya bagi beberapa organisasi seperti Indische Partij (IP), PNI, Paguyuban Pasundan (PP), dan bahkan beberapa organisasi radikal. Beberapa organisasi besar seperti SI, Budi utomo (BU), dan bahkan PKI memiliki cabang di Bandung (Abdullah, et al., 2013: 158.).

Organisasi-organisasi yang (dicap) radikal bertanggung jawab terhadap beberapa aksi mogok dan perlawanan kepada pemerintah kolonial sebagai sebagai wujud protes atas kebijakan yang tidak memihak masyarakat pribumi. Politik etis pada satu sisi memberi jalan bagi keterbukaan pada pola pikir dan cara pandang masyarakat pribumi, sehingga pada titik tertentu digunakan sebagai genderang perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal Dirk Fock (1921-1926) menjawab hal tersebut dengan reaksi represif, terutama kepada gerakan radikal yang dianggap membahayakan (Abdullah, et al., 2013: 59-61.). Pengawasan dan pengawalan semakin ketat dilakukan kepada organisasi atau perkumpulan yang disinyalir akan memantik dan mengobarkan gerakan radikal.

Bagaimana pelaksanaan politik reaksioner di Bandung dan bagaimana dampak dari pelaksanaannya merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Gerakan radikal di Bandung dihadapi oleh pemerintah kolonial dengan politik reaksioner. Jika Arif Akhyat dalam tesisnya yang berjudul “*Religious People’s Reaction towards Dutch Colonialism in Javanese Villages 1870-1930’s*” berusaha menjelaskan gagasan radikal Islam di Jawa terhadap pemerintah kolonial, maka penelitian ini berusaha menjelaskan politik reaksioner yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap gerakan radikal di Bandung pada tahun 1922-1927.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan berpedoman pada metode penelitian sejarah (Historical Method) yang menurut Kuntowijoyo (2005: 91) terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber, dan relevansi sumber), interpretasi (analisa dan sintesis), serta penulisan sejarah (historiografi). Sementara Helius Sjamsuddin (2012: 70) mengemukakan, bahwa metode sejarah terdiri dari beberapa tahap (1) memilih topik yang sesuai, (2) menyusun semua evidensi (bukti) yang sesuai dengan topik pembahasan, (3) membuat catatan yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang dibahas ketika penelitian sedang berlangsung, (4) mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber), (5) menyusun hasil-hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya, dan (6) penyajian dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikan kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti se jelas mungkin.

Metode penelitian sejarah menurut Helius Sjamsuddin menjadi pedoman yang digunakan dalam penelitian. Heuristik dilakukan setelah menentukan topik, tujuannya adalah mengumpulkan data yang relevan dan objektif. Sumber data diusahakan berupa dokumen dan pustaka dalam bentuk buku referensi, artikel ilmiah dalam jurnal, arsip, dan koran dari berbagai perpustakaan dan pusat arsip seperti Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional Republik Indonesia dan arsip online Delpher. Verifikasi berupa kritik intern dan ekstern dilakukan terhadap sumber yang berhasil dikumpulkan hingga terseleksi berupa sumber yang sifatnya primer dan sekunder. Interpretasi dilakukan terhadap data hasil verifikasi melakukan interpretasi secara mendalam agar data dapat dipahami dan diselaraskan dengan fokus penelitian. Tahap analisis data digunakan dalam penelitian ini untuk mengklasifikasi data yang sesuai dengan fokus penelitian terkait. Pada tahap akhir dilaksanakan penyusunan ulang ke dalam bentuk tulisan sejarah (historiografi).

PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Bandung pada Tahun 1920-an

Bandung merupakan kota kosmopolitan sejak awal, terutama setelah diresmikan sebagai pusat Karesidenan Priangan pada tanggal 7 Agustus 1864. Bandung menjadi kota favorit bangsa Eropa karena letak geografisnya yang menyebabkan suhunya dingin dan sumber daya alam yang

melimpah (Wiryawan, 2020: 173). Bandung mengalami perkembangan yang relatif cepat yang mendorong pada perkembangan dinamika sosial. Status Bandung berubah secara resmi dari regentie (kabupaten) menjadi gemeente (kota) pada tanggal 1 April 1906 (*Staatsblad No. 329 tanggal 23 Juli 1903*). Bandung sebagai gemeente dipimpin oleh burgermeester (walikota) berkebangsaan Belanda karena populasi bangsa Eropa relatif besar (Abdullah, et al., 2013: 243) (Voskuil, et al. 2017: 49). Besarnya populasi bangsa Eropa di Bandung secara tidak langsung menyebabkan tumbuh suburnya kaum intelektual di kalangan pribumi.

Pasca pemindahan pusat Priangan ke Bandung dan berubahnya status Bandung menjadi gemeente, Bandung bertransformasi menjadi kota kosmopolitan. Orang-orang dari berbagai tempat dan etnis berdatangan dan menetap di Bandung hingga terjadinya ledakan populasi. Bandung memiliki daya pikat besar karena lokasinya yang tepat untuk wisata, pusat pendidikan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan pusat otonomi daerah. Perkembangan sarana dan prasarana kota yang berkembang secara progresif juga menjadi daya pikat bagi orang-orang untuk migrasi ke Bandung. Jalur kereta api yang dibangun di Bandung melalui dua tahap pembangunan juga memudahkan migrasi. Tahap pertama dimulai pada tanggal 4 Januari 1916 untuk lajur Rancaekek-Jatinangor, Bandung-Soreang, dan Soreang-Ciwidey dan tahap kedua dimulai pada tanggal 28 Februari 1920 untuk lajur Bandung-Citeureup-Majalaya dan Dayeuhkolot-Majalaya (Dienaputra, 2011: 53). Perkembangan sarana dan prasarana tidak lepas dari rencana menjadikan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda menggantikan Batavia, sehingga di Bandung dibangun gedung-gedung untuk kantor pemerintahan (Dienaputra, 2011: 52).

Lonjakan bangsa Eropa di Bandung terjadi para kurun 1918-1924, yaitu dari 8.000 jiwa menjadi 15.600 jiwa (*Bevolkingstatistiek: Gemeente Bandoeng, Bandung: 1918-1925. Lampiran I*). Banyak di antara mereka yang merupakan kelahiran Hindia dan menikahi perempuan pribumi. Bangsa Timur Asing juga terhitung besar, mereka menetap di Bandung karena motif ekonomi. Tercatat pada tahun 1230-1925 jumlah bangsa Timur Asing adalah 9.400-12.900 (*Bevolkingstatistiek: Gemeente Bandoeng, Bandung: 1918-1925. Lampiran II*). Penduduk asli Bandung adalah etnis Sunda yang tercatat pada tahun 1920-1924 adalah 42.400-102.500 (*Bevolkingstatistiek: Gemeente Bandoeng, Bandung: 1918-1925. Lampiran III*). Jumlah penduduk pribumi tertinggi menurut usia adalah kelompok usia 20-34 sebanyak 34.953 jiwa (*Bevolkingstatistiek: Gemeente Bandoeng, Bandung: 1918-1925. Lampiran III: 62*). Keberadaan klompok tersebut menjadi indikasi, bahwa Bandung merupakan primadona untuk para pencari kerja. Lonjakan populasi penduduk pribumi terjadi dalam kurun 1920-1922, tetapi dalam kurun waktu 1923-1924 relatif fluktuatif. Hal tersebut karena maraknya gerakan radikal yang menelan korban jiwa atau pindah ke daerah lain.

Masyarakat Bandung secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kaum pribumi dan bangsa asing. Kaum pribumi terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari kaum menak (bangsawan) dan somah (rakyat biasa). Kaum menak sendiri terbagi menjadi kelas menak luhur,

menak sedeng, dan menak handap. Somah merupakan rakyat biasa yang harus tunduk patuh dan mengabdikan pada kaum menak, terutama kelas menak luhur (Lubis, 1998: 130). Ikatan erat antara somah dengan menak, terutama bupati dengan rakyatnya dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk melaksanakan politik ekonomi kolonial, baik pada masa Prianganstelsel maupun cultuurstelsel. Hierarki sosial di Bandung pada perkembangannya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi hingga masyarakat dikelompokkan menjadi kelas atas (pengusaha perkebunan dan pertanian yang didominasi oleh bangsa Eropa dan Timur Asing), kelas menengah (kaum pekerja profesional seperti buruh dan pegawai negeri), dan kelas bawah (buruh rendah). Hierarki masyarakat juga dipengaruhi oleh politik hingga memunculkan kelas anggota dewan kota, kelas aristokrat, dan pegawai pribumi (pangreh praja).

Pemerintahan Bandung sifatnya dualisme karena ada dua pemerintahan, yaitu pemerintah kolonial dan pemerintah pribumi. Urusan umum menjadi tanggung jawab pejabat kolonial (*opperbestuur* dan *algemeen bestuur*) (Abdullah, et al., 2013: 252-253), sedangkan urusan khusus yang memerlukan sosialisasi dan komunikasi menjadi urusan pegawai pribumi. Kepala pribumi tetap menjadi perantara (*middleman*), terutama bagi residen kepada rakyat. Bandung secara bersama-sama dipimpin dan dikelola oleh asisten residen yang bekerja sama dengan bupati (Voskuil, et al. 2017: 49). Bupati melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan dinamika kota kepada asisten residen dan asisten residen mengkomunikasikan dengan residen. Secara bersama-sama residen, asisten residen, *burgermeester*, dan bupati memerintah Bandung sebagai *hoofdplaats* Priangan (*Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie: Kalender en personalia 1920-1927*).

B. Gerakan Radikal di Bandung

Pemerintah kolonial menganggap gerakan radikal di Bandung sejak tahun 1920 dapat menggoyahkan stabilitas pemerintahan kolonial. Peristiwa Cimareme dan Toli Toli membuat pemerintah kolonial mengawasi secara ketat organisasi dan perkumpulan yang ditengarai radikal. Penangkapan H.O.S Tjokroaminoto, Darsono, dan Sosrokardono tidak dapat mereduksi gerakan kaum pribumi (McVey, 2017:53-55), bahkan mendorong pemogokan. Persatuan Pegawai Pegadaian Bumi Putera (PPPB) sebagai *underbouw* SI melakukan pemogokan pada tahun 1922 karena penurunan upah dan pemecatan massal (Shiraishi, 1997: 320-321), sedangkan partai komunis menggerakkan sarikat buruh pegawai kereta api (VSTP) untuk melakukan pemogokan memprotes kebijakan pemerintah kolonial.

Para tokoh intelektual dan aktivis mendirikan organisasi atau perkumpulan dengan semangat melawan ketidakadilan. Hal lumrah adalah ketika satu tokoh menjadi dua anggota organisasi, misalnya S. Goenawan, Soediro, Soegono, Soebakat, dan Moh. Sanoesi yang memiliki keanggotaan ganda di SI, PKI, PPPB, dan VSTP. IP dibidik ISDV untuk digabung menjadi rekan bergerak. Setelah IP berubah menjadi Insulinde pada tahun 1916, ide radikal mulai menampakkan

diri karena ISDV berhaluan komunis. SI melakukan hal serupa hingga digolongkan sebagai organisasi radikal. ISDV berubah menjadi Partai Komunis pada tahun 1921 dan melakukan infiltrasi ke tubuh SI.

S. Goenawan merupakan *voorzitter*, baik di Partai Komunis maupun SI (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers* No.45 1921), bahkan memimpin tiga organisasi sekaligus, yaitu Partai Komunis, SI, dan PPPB cabang Bandung. SI Bandung erat dengan SI Semarang yang berhaluan kiri, sehingga SI Bandung berkategori merah. Haji Agus Salim (pimpinan SI Yogyakarta) membenci SI Bandung, sehingga menolak mengundang untuk mengikuti kongres SI di beberapa daerah (*Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers* No.45 1921). PPPB yang berafiliasi dengan SI putih menerima S. Goenwan karena ide-idenya dianggap mampu memimpin para pegawai pegadaian di Bandung (*Neratja* (29-09-1921) No.187). Moh. Sanoesi yang dikenal sebagai wartawan sekaligus sastrawan Sunda yang kritis, ia aktif di SI merah dan Partai Komunis. Tulisannya di surat kabar Sora Merdeka, Matahari, dan Sapoe Djagat merupakan kritik dan sindiran terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Moh. Sanoesi menulis cerpen “Gendjong Garoet” di surat kabar Sora Mardika yang bercerita tentang ketidakadilan pemerintahan kolonial dalam menangani perlawanan petani Cimareme (*Kaoem Moeda*, 21-02-1922, No.44). Pemerintah kolonial menangkap Moh. Sanoesi karena dianggap subversif yang mengobarkan radikalisme di Bandung.

Pola gerakan radikal di Bandung secara umum terdiri dari tahap edukasi, agitasi, dan aksi. Pada tahap *edukasi*, misalnya yang dilakukan Partai Komunis adalah menggunakan pendidikan sebagai sarannya. Tan Malaka mendirikan Hollandsch Indische School di Tegalega bagi rakyat biasa. Ideologi komunis disebarkan melalui pembelajaran tetapi karena diawasi ketat oleh kepolisian kolonial, maka para guru ditangkap dan dicabut izin mengajarnya. Tahap *agitasi* dilakukan untuk membisiki masyarakat agar ikut serta dalam aksi huru-hara, melawan, memberontak, dan mogok. Agitasi dilakukan dengan cara menyebar famplet, artikel, dan pengumuman di surat kabar seperti Matahari, Soerapati, Padjadjaran, Sapoe djagat, dan Soerapati. *Aksi* merupakan tahap puncak gerakan radikal, yaitu merealisasikan visi dalam bentuk pemogokan, pemberontakan, dan teror.

1. Pemogokan Buruh Pegadaian

Pemogokan buruh pegadaian (PPPB) di Cimahi pada tanggal 4 Pebruari 1922 merupakan reaksi terhadap pemotongan upah dan penghapusan tunjangan pegawai. Pemogokan tersebut setelah disetujui oleh Tan Malaka dan Semaun (McVey, 2017:167). Bupati R.A.A. Wiranatakusumah V turun tangan untuk mengedukasi bahkan mengancam jika tetap dilaksanakan, yaitu berupa pemecatan masal. Hal tersebut memecah keyakinan para pelaku pemogokan, sehingga aksi menjadi cerai berai (*Kaoem Moeda*, 6-2-1922, No. 31). Pemerintah kolonial menangkap beberapa tokoh yang diyakini sebagai pencetus aksi pemogokan tersebut, yaitu Tan Malaka, Bergsma, dan Abdoel Moeis.

2. Pemogokan Buruh Kereta api

Sarikat buruh kereta api (VSTP) yang memiliki basis besar di Bandung melakukan aksi pada tahun 1923 di bawah komando S. Goenawan, Moh. Sanoesi, Winanta, dan Soediro setelah melakukan pertemuan VSTP. Kegagalan aksi pemogokan buruh pegadaian menyulut emosi sarikat buruh kereta api, sehingga merencanakan pemogokan yang lebih besar. Jumlah anggota VSTP yang mencapai 2.100 orang dikerahkan, tetapi pemerintah kolonial sudah mengendusnya. Pemerintah kolonial menangkap S. Goenawan dan Soediro pada tanggal 11 Mei 1925 dengan tuduhan pelanggaran pasa 161 BIS, yaitu melakukan penghasutan dengan tujuan merusakkan ketertiban umum (*De Indische courant*, 12-10-1923, No.24).

3. Teror Bom

Gerakan radikal di Bandung tidak hanya berupa demonstrasi, pemogokan, dan perlawanan, tetapi di penghujung tahun 1925 terjadi aksi sporadik pelemparan bom ke pendopo bupati R.A.A. Wiranatakoesoemah V (*Bataviaasch nieuwsblad* 21-10-1925 No. 318). Hal tanarkis tersebut meresahkan sehingga dijadikan legitiimasi oleh pemerintah kolonial untuk melakukan reaksi keras terhadap gerakan radikal di Bandung.

4. Pemogokan Polisi

Kaum intelektual dan aktivis radikal berusaha menggerakkan massa besar, yaitu menghasut polisi kolonial dari kalangan pribumi untuk melakukan pemogokan. Pada tanggal 3 Februari tahun 1923 sekitar 50 orang polisi pribumi melakukan pemogokan karena adanya pencabutan tunjangan bulanan dan pengurangan upah (*De Indische Courant*, 5-2-1923, No. 119). Pemerintah kolonial memecat 30 anggota polisi dan memerintahkan kepala polisi kota mengumpulkan seluruh anggotanya agar melakukan kontrak tertulis untuk patuh terhadap pemerintah kolonial dan yang melanggar akan dikenai hukuman berat (*De Indische Courant*, 5-2-1923, No. 119; *De Sumatra Post*, 09-02-1923, No. 34).

5. Pemberontakan Partai Komunis

Serangkaian pemberontakan partai komunis yang terjadi di beberapa daerah pada kurun 1926-1927 tidak disetujui sepenuhnya oleh pimpinan pusat dan komiter karena rencananya belum matang hingga masih memungkinkan adanya celah yang dapat dimasuki oleh pemerintah kolonial untuk memukul mundur. Beberapa cabang akhirnya membentuk faksi sendiri dan melakukan pemberontakan dengan cara masing-masing. Pemberontakan partai komunis di Bandung dipimpin oleh Sukrawinata (1926) (McVey, 2017:473). Para pemberontak dibolehkan melakukan kekerasan dengan senjata, sabotase, dan pembunuhan. Sejak awal sudah diprediksi akan gagal karena para “dedengkot” aksi tidak memiliki kecakapan, tetap saja pemberontakan tersebut mencoreng muka pemerintah kolonial (Blumberger, 1935:75). Pemberontak mulai bertindak ganas dengan menyerang tanpa kecuali. Seorang pegawai desa dibunuh karena menolong anggota polisi. Masyarakat ketakutan tetapi

tidak mampu berbuat apa-apa kecuali bersembunyi. Pemerintah kolonial akhirnya murka karena sudah cukup sabar menanggapi aksi-aksi dari partai komunis (Blumberger, 1935:75). Pemerintah kolonial menindak dengan cara verbanning, yaitu membuang para pelaku aksi ke Boven Digul.

C. Pelaksanaan Politik Reaksioner di Bandung pada Tahun 1921-1927

State Exception (keadaan darurat) merupakan legitimasi pemerintah kolonial untuk menetapkan kebijakan politik reaksi. Hal tersebut dipilih agar tidak terjadi perang terbuka antara pemerintah kolonial dengan rakyat. Pada tahun 1920an sudah banyak kaum pribumi yang menyamai bangsa Eropa dalam hal pendidikan, cara pikir, pilihan tindakan, dan gaya hidup. Keberanian yang ditunjukkan oleh kaum pribumi seperti pada Peristiwa Cimareme dan Toli Toli adalah bukti bahwa kaum pribumi sudah melek. Kedua peristiwa tersebut dianggap sebagai penyebab keadaan darurat (*state of exception*), sehingga pemerintah kolonial menetapkan kebijakan politik sebagai alat memberangus gerakan radikal. Salah satu bentuknya adalah mengucilkan tokoh yang dianggap radikal seperti Tjipto Mangoenkoesoemo yang didepak dari bursa pemilihan gemeenteraad melalui kampanye hitam oleh IEV (*Indo-Europeesch Economische Verbond*) (*De Preanger Bode*, 4-10-1921, No. 270). Ada berbagai cara yang digunakan dalam pelaksanaan politik reaksi, tetapi secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan persuasif dan tindakan koersif. Tindakan persuasif biasanya berupa himbuan, ajakan, peringatan, ancaman, dan penekanan yang dilakukan oleh:

1. Bupati

Bupati adalah tokoh yang secara kultural pujaan masyarakat tradisional, tetapi kenyataannya mereka adalah pegawai kolonial. Rakyat pribumi tidak melihat bupati sebagai antek pemerintah kolonial, maka mereka tunduk patuh pada bupati. Ikatan tradisional tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial, termasuk untuk meredam gerakan radikal yang timbul dari kaum pribumi. R.A.A. Wiranatakoesoema V menjabat Bupati Bandung. Upaya membangun relasi antara pemerintah kolonial dengan rakyat terganggu oleh munculnya gerakan beberapa gerakan radikal seperti yang sudah dijelaskan di awal. Kaum radikal melakukan agitasi melalui media surat kabar, maka bupati juga melakukan propaganda di surat kabar *Kaoem Moeda* (*Kaoem Moeda*, 6-2-1922, No. 31). Hal tersebut dianggap duel halus antara kaum radikal dengan bupati untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat.

2. Tokoh Lokal

Pemerintah kolonial memanfaatkan tokoh lokal yang walaupun “invisible” tetapi kontribusinya nyata, misalnya pada pembentukan organisasi masyarakat Sarekat Hedjo dan Pamitran. Kedua organisasi masyarakat tersebut dibentuk pada tahun 1925 atas izin Patih Sumedang dan kemudian bekerja dengan melakukan propaganda kepada masyarakat untuk melakukan “terror” kepada basis organisasi radikal. Sarekat Hedjo menyebar ke berbagai

desa-desa karena mendapat dukungan dari pemerintah lokal. Salah satu “senjata” yang berhasil ditanamkan kepada masyarakat untuk memerangi gerakan radikal adalah pernyataan “komunis kafir” (*Api* 10-3-1925 No.56). Organisasi masyarakat pro pemerintah ini beberapa kali salah sasaran, misalnya ketika membidik seorang guru yang dianggap agen radikal, sehingga guru tersebut diamuk oleh massa. Anggota Sarekat Hedjo salah menginformasikan sehingga informasi yang beredar di masyarakat menjadi simpang siur.

3. Elit Eropa dan Pejabat Pribumi

Elite Eropa memiliki peran dalam meredam pengaruh gerakan radikal. Gerakan radikal bukan saja merusak stabilitas politik dan pemerintahan, bahkan bisa menghancurkan kehidupan bangsa Eropa. Ide-ide tentang kemerdekaan rakyat pribumi dikhawatirkan menggeser peran bangsa Eropa. Itulah sebabnya para elit dalam rangka mengecilkan dan melemahkan ruang gerak radikal menggunakan surat kabar Priangan Bode untuk propaganda. Hal tersebut didukung oleh pejabat pribumi yang memiliki ketergantungan kedudukan dan ekonomi sehingga mereka memiliki kewajiban moral kepada pemerintah kolonial. Peran mereka sangat nyata, salah satunya dalam mereduksi gerakan pemogokan buruh pegadaian. Mereka berhasil memojokkan para buruh dengan ancaman pemecatan, sehingga para buruh memilih berkompromi dan kembali bekerja kepada pemerintah (*Kaoem Moeda*, 7-2-1922, No. 32).

Pemerintahan kolonial melegalkan cara-cara koersif yang dilandaskan kepada dasar hukum. Tindakan koersif dilakukan untuk menyebar ketakutan dan memamerkan kekuatan kepada kaum radikal. Perangkat koersif pemerintah kolonial terdiri dari perangkat formal (kepolisian) dan perangkat informal (organisasi masyarakat reaksioner Sarekat Hedjo). Kepolisian Hindia Belanda adalah ujung tombak perangkat formal, mereka disebartugaskan di beberapa daerah terkait informasi gerakan radikal. Polisi Bandung yang dikepalai oleh J.C. Heijnen dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satuan polisi kota (*stadspolitie*) dan polisi lapangan (*veldpolitie*) (*Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie: Kalender en personalia* 1920-1927). Para polisi tersebut melakukan pengawasan ketat pada setiap aktifitas, baik terbuka maupun sembunyi-sembunyi terutama yang dicurigai bersifat subversif, mengancam, dan membahayakan. Polisi tidak segan-segan menangkap tokoh-tokoh radikal dan hal tersebut dianggap sebagai prestasi, sehingga kepada satuan polisi diberikan penghargaan.

Kekuatan informal juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah kolonial untuk menangani gerakan radikal di Bandung. Organisasi masyarakat (ormas) reaksioner Pamitran dan Sarekat Hedjo (SH) menjadi kekuatan informal pemerintah kolonial. Ormas Pamitran didirikan pada 1924 di Banjaran, sedangkan SH pada tahun 1925 di Sumedang (*Bataviaasch nieuwsblad*, 31-01-1925, No.60). Mobilitas kedua ormas tersebut sangat fleksibel karena didukung oleh pemerintahan lokal. Sasarannya adalah perkumpulan dan tokoh yang diindikasikan merah (kiri). Kedua ormas tersebut mendoktrinasi, bahwa merah adalah komunis dan komunis adalah kafir.

Anggotanya bergerilya dan tidak segan segan melakukan terror, penyerangan, pengucilan, dan bahkan penculikan. Masyarakat yang merasa terancam tidak segan melaporkan kepada polisi kota, tetapi tidak digubris karena memang polisi mendukung aksi mereka untuk mereduksi gerakan radikal.

Selama kurun waktu 1920-1927, pemerintahan Hindia Belanda masif melakukan upaya untuk mengatasi pergerakan radikal. Gubernur Jenderal Dirk Fock mengubah alur dan sifat kebijakan ke arah yang lebih keras. Upaya yang intens dilakukan oleh pemerintahan kolonial nyatanya tidak memberikan efek jera bagi gerakan radikal. Tekanan yang dilakukan oleh pemerintah justru menciptakan perlawanan yang baru secara terus menerus. Pemerintah kolonial melancarkan pendekatan persuasif serta koersif secara bersamaan. Pendekatan persuasif dilakukan melalui propaganda menggunakan surat kabar, tujuannya adalah mencapai konsensus masyarakat. Surat kabar merupakan sarana masyarakat untuk mendapatkan informasi oleh kaum atas dan menengah, dan bahkan kaum bawah. Pemerintah kolonial melalui kepala pribumi, pejabat pribumi, dan elit Eropa melakukan propaganda melalui surat kabar *Preanger Bode* dan *Kaoem Moeda*. Contohnya adalah kampanye hitam bagi Tjipto Mangoenkoesoemo yang mencalonkan diri menjadi *gemeenteraad* diterbitkan *Preanger Bode* No. 267 pada 1 Oktober 1921 (*De Preanger Bode*, 1-10-1921 No. 267). *Preanger Bode* selalu menggunakan *tagline* di artikel dengan tulisan “Bukan tanggung jawab editor”.

Sementara Bupati R.A.A. Wiranatakoeoemah V menggunakan surat *Kaoem Moeda* untuk propagandanya. Ia memiliki relasi kuat dengan pimpinan redaksi *Kaoem Moeda*, yaitu *Padmawiganda* hingga tidak heran jika *Kaoem Moeda* memuat himbauan sang bupati untuk masyarakat Bandung. “Treatment” sang bupati kepada pemogokan buruh berhasil menghentikan pemogokan karena anggotanya bimbang. Haji Agus Salim berangkat hingga ia memberikan surat terbuka kepada bupati. Ia tidak setuju dengan pendapat bupati karena pemogokan tersebut bukan hasutan politik tetapi berdasar kenyataan, bahwa upah kepada buruh diturunkan dan tunjangan dihapuskan.

Pemerintah kolonial mencurigai pendidikan sebagai penyebar ide radikal. HIS Tegalega dicurigai sebagai wahana penyebaran ide komunis karena didirikan oleh Tan Malaka sebagai salah satu tokoh pendiri Partai Komunis Hindia Belanda. Polisi melakukan penggeladahan ke HIS Tegalega pada tanggal 14 Februari 1922 dan menyita beberapa buku, salah satunya adalah *Parliament of Soviet* (*Algemeen Handelsblad*, 12-08-1927). Polisi juga melakukan razia pada tanggal 22 Desember 1922 kepada Komunitas Pecinan karena buku-buku dari komunitas tersebut sudah masuk ke barak militer (*De Express*, 23-12-1922, No.295). Sebanyak 65 orang tantara di markas militer Batu Jajar ditangkap karena dicurigai sebagai agen kiri. Sekolah Sarekat Rakyat (SSR) Rancaekek juga dicabut izin operasionalnya pada tahun 1925 karena pengajarnya terlibat dalam aksi radikal di Sumedang.

Pemerintah kolonial juga melakukan pembredelan terhadap beberapa surat kabar yang dianggap menghasut dan menyebarkan kebencian kepada pemerintah kolonial. Sora Mardika dibredel pada tanggal 2 September 1920 (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*, 2 September 1920 No. 204), *Sapoe Djagat* dibubarkan pasca ditangkannya redaktur K.B. Mandjono dengan tuduhan *persdelict* (*Sapoe Djagat*, 25 September 1923 No.14), Matahari juga dibubarkan pasca ditangkannya pimpinan redaksi Moh. Sanoesi, dan pada tanggal 6 Juni 1925 giliran Soerapati yang dibubarkan karena mencetak artikel kebencian yang berjudul “Pemerintahan dan Tan Malaka” (*De Tribune*, 14 Juli 1925 No. 239). Pemerintah kolonial tidak bertindak gegabah karena sebelum melakukan tindakan koersif sudah membentuk dasar hukum terlebih dahulu. Berikut adalah pasal-pasal khusus dalam Regeering Reglement terkait dengan legalitas tindakan koersif pemerintah kolonial (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 10 Mei 1923, No.222).

1. Pasal 110 tentang larangan mengadakan perkumpulan rahasia yang bertujuan menghasut berbuat jahat atau mengganggu ketertiban.
2. Pasal 161 bis tentang hukuman bagi orang yang melanggar ketertiban umum atau meruntuhkan perekonomian masyarakat, yaitu dengan penjara 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.
3. Pasal 153 tentang hukuman bagi pembicara atau penulis yang melakukan penghasutan dengan tujuan mengganggu ketertiban umum. Gubernur Jenderal berhak melakukan extraorbitante berupa pengusiran (*externering*), internir (*internering*), dan membuang (*verbaning*) seseorang yang terduga melanggar ketertiban umum.
4. Pasal 155 tentang hukuman bagi orang yang menyiarkan, menontonkan, dan menempelkan di tempat orang banyak berupa surat atau gambaran yang akan menimbulkan kebencian terhadap pemerintah kolonial.
5. Pasal 207 tentang hukuman bagi siapa saja yang sengaja dihadapan orang banyak (baik dengan lidah atau surat) membuat malu kepada kuasa yang ditetapkan oleh pemerintahan kolonial.
6. Pasal 156 tentang hukuman bagi setiap orang yang menimbulkan permusuhan dan kebencian ke sesama rakyat Hindia Belanda.

Politik reaksioner relati efektif menumpas gerakan radikal di Bandung. Pada akhirnya gerakan radikal memberikan saluran kepada perkembangan menuju arah “nasional” yang ditandai oleh terbentuknya Partai Nasional Indonesia di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 yang mengusung visi kemerdekaan bangsa (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, 10 Mei 1923, No.222). Bandung adalah kosmopolitan yang menjadi kota tempat berkumpulnya para intelektual, apa lagi di Bandung menjadi pusat pendidikan yang menyedot para intelektual merekatkan kekuatan bersama. Penghujung tahun 1927 aksi-aksi tidak lagi berhalauan radikal, tetapi dikemas dalam bentuk yang elegan tanpa kekerasan meskipun melibatkan massa yang besar. Setiap gerakan melandaskan diri pada ideologi nasional karena ideologi tersebut menarik perhatian dan minat masyarakat pribumi secara luas.

KESIMPULAN

Kondisi sosial Bandung pada tahun 1920-an berubah menjadi kota kosmopolitan setelah dijadikan sebagai pusat Karesidenan Priangan. Populasinya termasuk besar karena menjadi tujuan para imigran dari berbagai daerah, termasuk bangsa Eropa. Bandung sebagai pusat pendidikan menjadi

tempat berkumpulnya para intelektual dan aktivis, sehingga berbagai organisasi dan pergerakan tumbuh subur di kota tersebut, bahkan organisasi besar seperti Sarekat Islam juga memiliki cabang di sana. Penduduk Bandung sangat heterogen tapi secara ekonomi terkelompokkan menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Hierarki tersebut tidak hanya berdasarkan ekonomi tetapi politik dan pemerintahan serta pendidikan.

Gerakan Radikalisme di Bandung pada tahun 1920 berupa kemunculan organisasi dan perkumpulan yang dipengaruhi oleh multifaktor. Kaum intelektual berpikir, bahwa pemerintah kolonial tidak adil, sehingga harus dilawan agar tercipta keadilan. Ideologi juga mempengaruhi aksi yang dijalankan untuk mencapai keadilan dan juga memberi bentuk kepada sifat gerakan itu sendiri. Label radikal disematkan kepada aksi-aksi perlawanan terutama yang disertai kekerasan. Gerakan-gerakan radikal tersebut adalah (1) Gerakan Pemogokan pegawai pegadaian (1922), (2) pemogokan buruh pegawai kereta api (1923), pemogokan pegawai kepolisian (1923), terror bom di pendopo Bupati Bandung (1925), dan pemeberontakan partai komunis (1926).

Politik Reaksioner di Bandung pada Tahun 1921-1927 dilaksanakan untuk mengatasi gerakan radikal menyebabkan pemerintah kolonial menetapkan state of exception (keadaan darurat), sehingga muncul kebijakan politik reaksioner. Bentuk dari politik reaksioner adalah tindakan persuasif dan koersif. Tindakan persuasif sifatnya non-kekerasan yang dijalankan dalam bentuk himbauan, ajakan, peringatan, ancaman maupun penekanan dengan tujuan mendapatkan penerimaan secara moral dan informal dari masyarakat dalam rangka menyempitkan ruang intelektual dari pergerakan radikal. Tindakan tersebut dilakukan oleh bupati, elit Eropa, dan pejabat pribumi melalui saluran surat kabar. Pemerintah kolonial juga melegalkan tindakan koersif dengan berlandaskan kepada dasar hukum. Tindakan koersif dilakukan untuk menyebar ketakutan sekaligus memamerkan kekuasaan kepada kaum radikal. Perangkat koersif pemerintah kolonial terdiri dari perangkat formal, yaitu kepolisian dan perangkat informal yaitu organisasi masyarakat reaksioner Sarekat Hedjo dan Pamitran. Hukuman kepada mereka yang tidak tunduk, yaitu kurungan dan denda, externering (pengusiran), internir (internering), dan membuang atau mengasingkan (verbaning).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, et.al. 2013. *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 5 (Masa Pergerakan Kebangsaan)*. Jakarta: Kemendikbud.

Algemeen Handelsblad, 12-08-1927

Api, 10-3-1925 No.56

Azhar, Hafidz. 2021. *Bandung di Persimpangan Kiri Jalan. Bandung: Oleh Oleh Boekoe Bandoeng*.

Bataviaasch nieuwsblad, 31-01-1925, No.60

Bataviaasch nieuwsblad, 21-10-1925, No. 318

Bevolkingstatistiek: Gemeente Bandoeng, Bandung: 1918-1925

Bloembergen, Marieke. 2011. *Polisi Zaman Hindia Belanda: Dari Kepedulian dan Ketakutan*. Jakarta: Kompas.

Blumberger, Petrus. 1931. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*. Batavia: Oud Nederlandsch Indisch Bestuurambtenaar.

Blumberger, Petrus. 1935. *De Communistische Beweging in Nederlandsch Indie*. Batavia: Oud Nederlandsch Indisch Bestuurambtenaar.

Blumberger, Petrus. 1939. *De Indo-Europeesche Beweging in Nederlandsch Indie*. Batavia: Oud Nederlandsch Indisch Bestuurambtenaar.

De Express, 23-12-1922, No.295

De Indische Courant, 4-2-1922, No.121

De Indische Courant, 5-2-1923, No. 119

De Indische Courant, 12-10-1923, No.24

De Indische Courant, 01-10-1926, No.14

De Locomotief, 18-11-1926, No.265

De Preanger Bode, 4-10-1921, No. 270

De Preanger Bode, 01-10-1921, No. 267

De Sumatra Post, 09-02-1923, No. 34

De Tribune, 14 Juli 1925 No. 239

Dienaputra, Reza. 2011. *Sunda: Sejarah, Budaya, dan Politik*. Sumedang: Sastra Unpad Press.

Ekadjati, Edi S. 1998. *Sejarah Pendidikan Jawa Barat*. Jakarta: Depdikbud.

Hayati, Chusnul. 2000. *Peristiwa Cimoreme 1919: Perlawanan Haji Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi*. Semarang: Mimbar.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 02-09-1920 No. 204

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 08-03-1923, No.56

Het volk : Dagblad voor de arbeiderspartij, 17-11-1926, No.8155

Ingelson, John. 2015. *Buruh, Serikat, dan Politik*. Tangerang: Matjin Kiri.

Kaoem Moeda, 3-10-1921 No. 44

Kaoem Moeda, 6-2-1922 No. 31

Kaoem Moeda, 7-2-1922, No. 32

Kaoem Moeda, 8-2-1922, No. 33

Kaoem Moeda, 14-2-1922 No. 38

Kaoem Moeda, 15-2-1922, No.39

Kaoem Moeda, 21-02-1922, No.44

Koentowijoyo, 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

Kurnia, Atep. *Jejak-Jejak Bandung: Menelisik Bandung dari Mula Parisj van Java hingga Ibu Kota Asia-Afrika*. Bandung: Oleh Oleh Boekoe Bandoeng.

Lubis, Nina Herlina. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.

McVey, Ruth. 2017. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.

Neratja, 29-09-1921, No.187

Ong, Hok Ham. 2017. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunita Bambu.

Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers No.41, 1921

Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers No.45 1921

Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers No.14 1925

Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers No.33 1922

Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers, No.14 1924

Overzicht van de Inlandsche en Maleisisch-Chineesche pers, No.8 1925

Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.

Regeerings Almanak voor Nederlandsch Indie: Kalender en personalia 1920-1927

Rotterdamsch nieuwsblad, 03-01-1927, No.939

Sapoe Djagat, 25 September 1923 No.14

Sarekat Islam. 1975. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Shiraishi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*.

Soprpto. 1913. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*. Cilacap: Tjilacap Regenschappensecretaris.

Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng Over de Jaren 1906-1918

Voskuil, Robert. 2017. *Citra Sebuah Kota*. Bandung: ITB.